

Agenda Setting Pemerintah Kabupaten Badung dalam Kebijakan *New Normal Tourism* COVID-19

Putu Jasisca Angelya¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, A.A.S. Mirah Mahaswari Jayanti Mertha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : jasiscaangelya@gmail.com¹⁾, ketuterawan@unud.ac.id²⁾, mahaswari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The New Normal Tourism policy made by the local government of Badung Regency has become a policy in the midst of the Covid-19 pandemic. Agenda Setting Theory by John W. Kingdon which is used to dissect research and examine agenda setting that occurs in the local government of Badung Regency. In this study using qualitative research methods through interviews with several sources and archives obtained from the DPRD Badung Regency. The results of this study the authors get as follows: First, the New Normal Tourism policy only becomes a government discourse in society. Second, there is no pressure from the government or non-government in following up on the New Normal Tourism policy. Third, the highest power is held by the central government in dealing with the New Normal Tourism policy in the local government of Badung Regency.

Keywords : *agenda setting, new normal tourism, pandemic Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Eksplorasi wisata belum lengkap tanpa mengunjungi destinasi pariwisata Bali. Pariwisata digemparkan di awal tahun 2020 dengan adanya pandemi atau yang biasa disebut dengan *Coronavirus Disease* (COVID-19). Dampak pariwisata yang terjadi khususnya di Bali yaitu mengalami penurunan kedatangan wisatawan asing. Terlihat jelas pada data BPS bahwa wisatawan asing yang berkunjung ke Bali hampir 90% mengalami penurunan di tahun 2020 yang di mana berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu 2019. Hal ini sangatlah membahayakan bagi kondisi daerah pariwisata Bali khususnya Kabupaten

Badung yang di mana memiliki destinasi pusat pariwisata terbesar di Bali.

Menghadapi pandemi Covid-19, adanya kebijakan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia diharapkan oleh Presiden dapat mengurangi penyebaran virus malah sebaliknya membahayakan kondisi Kabupaten Badung. Pada 31 Maret 2020 Presiden Jokowi juga mengeluarkan PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Tidak berkurangnya kasus Covid-19 maka berbagai macam kebijakan yang dibuat pemerintah pusat

seperti adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku hingga di tahun 2021. Berbagai kebijakan pusat yang diharapkan dapat mengatasi penyebaran virus, justru malah membahayakan kondisi pariwisata Bali khususnya daerah pariwisata Kabupaten Badung. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tentunya sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan pemerintah daerah Kab. Badung dalam mensejahterahkan daerah dan masyarakatnya. Dengan pendapatan ekonomi yang rendah, maka Badung tentunya akan tambah sulit pada masa pandemic.

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menanggapi *New Normal* di Bali mengeluarkan SE Bupati Badung No. 259 Tahun 2020 tentang Kesiapan Stakeholder Pariwisata di Kab. Badung menuju *New Normal Tourism*. Kebijakan ini dibuat dengan harapan dapat membangkitkan kembali pariwisata di Badung dengan mengikuti tata kehidupan baru atau era baru di Bali. Kabupaten Badung sebagai daerah yang paling besar terkena dampak dari adanya pandemi ini melakukan terobosan terbaru dalam pariwisata dengan kebijakan *New Normal Tourism* yang tentunya dinantikan para wisatawan domestik maupun non-domestik.

Tidak hanya itu, pemda Kab. Badung malah tidak terlihat dalam pergerakan penanganan kasus Covid-19 yang membahayakan pariwisatanya. Kabupaten Badung dengan kebijakan *New Normal Tourism* yang dinantikan oleh masyarakat bahkan wisatawan, malah menjadi sebuah

wacana belaka oleh pemerintah. Tidak adanya kelanjutan kebijakan maupun perda yang menopang dari adanya kebijakan *New Normal Tourism*. Malahan yang terjadi hanyalah inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Kebijakan *New Normal Tourism* yang awalnya dianggap menjadi pilihan terbaik yang diputuskan pemerintah Kabupaten Badung sebagai kebijakan dalam menghadapi pariwisata di masa pandemic saat ini, malah menjadi sebuah wacana pemerintah karena tidak adanya kelanjutan dari kebijakan tersebut.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Agenda Setting

Penelitian ini menggunakan teori *Agenda Setting* menurut John W. Kingdon. Inovasi konseptual pertama adalah mengidentifikasi dan membedakan dua proses politik yang secara jelas dibedakan dari aspek politik yang lebih dikenal sebagai penetapan agenda dan spesifikasi alternative. Aktor-aktor kebijakan tidak luput dalam suatu proses pembentukan kebijakan. Factor partisipan/ aktor adalah peserta atau aktor yang terlibat dalam proses pembuatan Agenda Setting yang terbagi menjadi dua golongan (Kingdon, 1995) , yaitu: Dalam Pemerintahan (*Inside of Governmet*) sebagai contoh: Pejabat Politik, Pegawai Negeri/Aparat Pemerintah, dan Luar Pemerintahan (*Outside of Government*) sebagai contoh: Kelompok Kepentingan, Peneliti, Akademisi, Yayasan, Peserta Pemilu, dan Opini Publik. Sedangkan inovasi

konseptual kedua adalah tiga aliran yaitu: masalah, kebijakan, dan politik.

Aliran dalam Agenda Setting Kingdon

Terdapat tiga aliran di dalam tahapan *agenda setting* menurut John W. Kingdon (1995) yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*politics stream*). Aliran-aliran tersebut itu lah yang memproses sehingga terbentuknya suatu kebijakan publik. Kebijakan seperti disebutkan berasal dari adanya suatu permasalahan yang dianggap penting bagi pemerintah untuk diselesaikan dengan dibentuknya suatu kebijakan publik.

Berawal dari aliran masalah (*problem stream*) isu-isu publik yang diseleksi oleh pemerintah sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah secara alternatif mapun dengan solusi atas masalah tersebut, maka dari itu adanya aliran kebijakan (*policy stream*). Terakhir tentunya dengan kekuatan politik dalam aliran politik (*politics stream*) yang tidak luput dari suatu proses kebijakan publik. Adanya ketiga aliran tersebut yang berproses dapat membentuk jendela kebijakan (*policy window*) serta mendatangkan adanya *policy entrepreneur* atau yang biasa disebut sebagai pihak-pihak yang kepentingan memiliki kemampuan dan sumber daya.

New Normal Tourism

Adanya isu pariwisata dengan konsep tata era baru di Kabupaten Badung dengan tujuan membangkitkan kembali industry pariwisatanya. Dalam rangka menjalankan *New Normal* di Bali , Pemkab Badung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati

Badung Nomor 259 Tahun 2020 tentang Kesiapan *Stakeholder* Pariwisata di Kabupaten Badung Menuju "*New Normal Tourism*" pada tanggal 4 Juni 2020. Inilah yang menjadi topik pada penelitian ini di mana adanya kebijakan tersebut masih menjadi sebuah wacana.

Bupati Giri Prasta sebelumnya mengatakan bahwa pada intinya Badung telah siap menyambut budaya hidup baru di sektor pariwisata pada 9 Juli 2020 (Republika.co.id, 2020). Untuk menghormati dan menjaga rasa solidaritas *one island one management*, beliau juga mengatakan bahwa Kabupaten Badung tetap menunggu keputusan dari pemerintah provinsi dan pusat terkait pelaksanaan *New Normal* pariwisata di Badung. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Badung adalah tidak adanya dasar hukum yang kuat dan jelas dalam menjalankan *New Normal Tourism*. Tidak adanya dasar hukum, yang di mana seharusnya menjadi sebuah fondasi dari adanya suatu kebijakan. Tidak selarasnya kebijakan pusat dan daerah dalam membuka kembali pariwisata sesuai dengan makna "*New Normal Tourism*" , hal ini membuat kondisi pariwisata di Kabupaten Badung terpuruk dan tidak dapat berkembang dengan baik pada masa pandemic *Covid-19*.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus. Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2007).

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan informan dilakukan di DPRD Kabupaten Badung dan BPC PHRI Badung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi Kab. Badung

Dalam kondisi ekonomi dan pendapatan daerah Badung dari data BPS, kontributor utama perekonomian Kabupaten Badung berasal dari sektor pariwisata. Tidak hanya itu, data pendapatan daerah yang dilansir oleh Kementerian Keuangan menyatakan besarnya kapasitas fiskal Kabupaten Badung dengan total pendapatan mencapai Rp5,4 triliun pada tahun 2019. Tak heran jika kabupaten Badung dinyatakan sebagai salah satu kabupaten terkaya dan pariwisatanya adalah penyumbang APBD terbesar di Provinsi Bali. Namun keadaan berubah di tahun 2020 di mana adanya pandemi Covid-19 menyebabkan PAD Badung pun menurun drastis hampir sebesar 50%.

Bupati Badung Giri Prasta mengatakan (badungkab.go.id, 2021) bahwa Badung berkontraksinya ini berdampak penuh terhadap sosial dan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Di Kabupaten Badung ini bersumber 85% dari PAD, yaitu pajak hotel dan restaurant. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa tidak adanya kedatangan wisatawan yang masuk ke Bali. Tentu saja hal ini menyebabkan perekonomian Badung sangat menurun daripada di tahun sebelumnya.

Hasil dan Analisa Temuan

Aliran Masalah (*Problem Stream*)

Menurut Kingdon (1995) dalam membedah penelitian ini, masalah datang ke perhatian pembuat kebijakan melalui indikator, memfokuskan peristiwa dan umpan balik.

Pariwisata Badung yang memperhatikan pada masa pandemi Covid-19 ini menjadi masalah yang sangat dekat di masyarakat maupun pemerintah daerah Kab.Badung. Anjloknya pariwisata di Kabupaten Badung sendiri pun banyak mengakibatkan kebangkrutan dari pihak hotel dan restaurant yang ada di daerah wisata Badung. Tidak hanya itu, pendapatan masyarakat maupun pemerintah daerah Kab. Badung yang berasal dari pariwisata pun mengalami penurunan drastis. Permasalahan pariwisata di masa pandemi *Covid-19* menjadi salah satu permasalahan yang seharusnya dibuatkan solusi oleh pemerintah.

Kebijakan SE Bupati Badung No. 259 Tahun 2020 mengenai *New Normal Tourism* menjadi salah satu kebijakan oleh pemerintah dengan harapan dapat mengatasi masalah pariwisata di Kab. Badung itu sendiri. Kebijakan yang dibuat pada bulan Juni 2020 tersebut mendapatkan antusias yang baik oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, tahun 2020 kasus Covid-19 semakin meningkat bahkan pandemi semakin memburuk. Hal ini tentunya menyebabkan kebijakan *New Normal Tourism* tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana. Dalam wawancara dengan Dewan Komisi II Kab. Badung yang mempertegas dengan tidak adanya aktivitas yang dilakukan pada masa pandemi tahun 2020 kemarin. Pemerintah

pusat memang membuat kebijakan untuk segala kegiatan esensial maupun non esensial haruslah dibatasi bahkan dilakukan *Work From Home* "WFH". Beberapa narasumber di DPRD Kab.Badung juga membenarkan hal tersebut, salah satunya adalah staff yang bekerja di Bagian Kajian dan Perundang-undangan mengakui tidak adanya kegiatan yang dilakukan di DPRD selama pandemi 2020 kemarin. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah tidak dapat melakukan apapun di tahun itu.

Upaya pemerintah yang tertuang dalam kebijakan *New Normal Tourism* ternyata hanya menjadi sebuah kebijakan yang tertulis di dalam surat edaran Bupati Badung. Tidak adanya kelanjutan yang dilakukan dari pemerintah Kab. Badung, bahkan kebijakan tersebut tidak dipertegas kembali dalam sebuah perda. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa masalah ini melibatkan beberapa pihak yang mengalami kerugian baik dari masyarakat, pengusaha, bahkan dari pemerintah daerah Kab.Badung yang mengalami penurunan PAD. Tidak adanya *feedback* atau umpan balik yang diberikan pemerintah dari kelanjutan SE Bupati Badung mengenai *New Normal Tourism* tersebut.

Aliran Kebijakan (*Policy Stream*)

Menurut Kingdon ada tiga poin dalam arus kebijakan (*policy stream*) yang terbagi menjadi: *Criteria for Survival* kriteria untuk bertahan hidup, *Policy Communities*, dan *Policy Entrepreneurs*.

New Normal Tourism menjadi hal yang diterima di kalangan masyarakat bahkan pihak PHRI pun sangat menerima kebijakan tersebut sebagai pelaku di industry pariwisata.

Kebijakan ini memang sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan pariwisata di masa pandemi Covid-19. Masyarakat bahkan akademisi yang menyelenggarakan seminar pun turut menantikan kelanjutan dari adanya *New Normal Tourism* ini.

Pemerintah daerah dalam hal ini khususnya di DPRD Kab. Badung sangat menyambut adanya kebijakan *New Normal Tourism* yang diungkapkan narasumber dalam wawancara. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini hanya menjadi sebuah wacana pemerintah. Kondisi pandemi yang semakin meningkat di tahun 2020 menyebabkan tidak adanya kelanjutan dari kebijakan *New Normal Tourism* di pemerintah daerah Kab.Badung itu sendiri. Hingga di tahun 2021 pun pemerintah daerah tidak terlihat dalam pembahasan mengenai kebijakan pariwisata. Hasil rapat sidang paripurna dan data hasil penelitian menyatakan memang tidak adanya kelanjutan dari kebijakan *New Normal Tourism*. Kebijakan yang masih berbentuk surat edaran Bupati Badung ini tidak ada rencana untuk dibuatkan perda atau ditindak lanjuti kembali.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di DPRD Kab. Badung menyatakan bahwa tidak perlunya perda terkait *New Normal Tourism*, hal ini dikarenakan kebijakan ini juga berasal dari pusat dan sudah seharusnya mengikuti apa yang menjadi keputusan di atas, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Kebijakan ini pun menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah yang menjadikan pemerintah pusat sebagai tolak ukur dalam menindaklanjuti kebijakan *New Normal Tourism* tersebut. Harmonisasi antara pemerintah daerah Kab. Badung

dengan pemerintah pusat menjadikan kebijakan *New Normal Tourism* ini hanya menjadi sebuah kebijakan yang menunggu arahan dari keputusan pusat. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa banyak terjadi inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah.

Aliran Politik (*Politics Stream*)

Menurut Kingdon (1995) aliran politik berfokus pada tiga kunci factor politik yang memengaruhi agenda: suasana nasional, politik terorganisir kekuatan dan pergantian administratif atau legislatif.

Politik menjadi hal yang tidak luput dari adanya suatu kebijakan. *New Normal Tourism* yang menjadi sebuah kebijakan pada masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang sangat sulit untuk dibedah dalam penelitian. Kondisi di masa pandemi yang buruk menyebabkan kebijakan *New Normal Tourism* memiliki banyak kendala. Pemerintah daerah khususnya DPRD Kab. Badung sendiri menyatakan bahwa kondisi kesehatan dan ekonomi memang harus sama-sama diutamakan. Namun segala hal tetap menjadi keputusan yang di atas, yaitu pemerintah pusat.

Masyarakat bahkan pelaku industry pariwisata tentunya mengharapkan pariwisata dapat kembali seperti semula. Namun kekuasaan politik yang dirasakan di pemerintah daerah Kab. Badung lebih dominan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat dengan pernyataan narasumber DPRD Kab. Badung yang membahas mengenai harmonisasi dan tetap bersinergi dengan pusat. Itu berarti pemerintah daerah akan menunggu

keputusan dari yang di atas tanpa melihat keadaan di masyarakat.

Kebijakan *New Normal Tourism* yang tidak memiliki kelanjutan tersebut dapat terlihat pula pada sidang paripurna ketiga DPRD Kab. Badung. Dalam sidang tersebut, ada beberapa pandangan dari beberapa fraksi yang membahas mengenai raperda. Salah satu dari partai politik yaitu fraksi PDIP pun ketika menyampaikan raperda tidak menyinggung masalah pariwisata. Padahal partai politik PDIP yang seharusnya menjadi tempat aspirasi masyarakat Badung dapat mengusulkan raperda terkait permasalahan pariwisata. Dan tentunya kebijakan *New Normal Tourism* yang masih sebuah surat edaran tersebut sangatlah penting bagi banyak pihak di kondisi pariwisata yang memburuk di masa pandemi.

Dalam penelitian yang dilakukan di DPRD Kab. Badung mendapatkan hasil yang dimana kondisi pandemi menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat melakukan apapun. Pemerintah pusat menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan *New Normal Tourism*, tanpa melihat situasi di masyarakat. Bahkan adanya program *Work From Bali* (WFB) yang diadakan di Badung pun hanya diterima dan pemerintah daerah menyambut kebijakan tersebut dengan mempersiapkan infrastruktur saja tanpa menindaklanjuti dengan kebijakan maupun perda.

Jendela Kebijakan (*Policy Window*)

Jendela kebijakan yang muncul ketika tiga aliran di atas bisa datang bersamaan dengan para politisi setuju ada masalah yang perlu dipecahkan, dan aliran kebijakannya berisi tanggapan dan tanggapan pendukung.

Jendela kebijakan yang muncul ketika tiga aliran di atas bisa datang bersamaan dengan para politisi setuju ada masalah yang perlu dipecahkan, dan aliran kebijakannya berisi tanggapan dan tanggapan pendukung. Pertemuan ketiga aliran, jika mereka datang bersama-sama, menghasilkan item agenda dan ditentukan alternative. Dalam permasalahan kebijakan *New Normal Tourism* di pemerintah daerah Kab. Badung ternyata tidak mendapatkan hasil yang baik dari ketiga aliran tersebut. Adanya pandemi yang meningkatkan kasus *Covid-19* di Bali menyebabkan tidak adanya jendela kebijakan yang terjadi pada kebijakan tersebut. Dapat dilihat pula pada aliran politik yang di mana pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan ini. Sehingga aliran kebijakan yang terjadi di pemerintah Kabupaten Badung pun juga mengikuti arahan pusat tanpa didesak oleh pemerintah daerah maupun luar pemerintah.

5. KESIMPULAN

Aliran masalah (*problem stream*) dalam teori *Agenda Setting* Kingdon, pariwisata Kab. Badung di tengah pandemi *Covid-19* menyebabkan adanya berbagai kerugian di berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan SE Bupati Badung No. 259 Tahun 2020 mengenai *New Normal Tourism*. Tentunya hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat dan para pelaku industry pariwisata. Namun pada penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah daerah Kab. Badung ternyata hanya mengikuti arahan dan keputusan dari pemerintah pusat. Kebijakan *New Normal*

Tourism menjadi sebuah wacana pemerintah yang menjadi masalah di masyarakat.

Aliran kebijakan (*policy stream*) menurut Kingdon, kebijakan *New Normal Tourism* dalam SE Bupati Badung No. 259 Tahun 2020 dapat dipertegas kembali dengan dibuatkannya perda. Melihat kondisi di masyarakat bahkan PHRI sebagai perwakilan dari Hotel dan Restaurant di Kab. Badung pun sangat menantikan kebijakan mengenai pariwisata. Namun pada hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan yang seharusnya dapat ditindaklanjuti melalui perda, hanya menjadi sebuah wacana pemerintah. Hal ini terhenti dikarenakan adanya harmonisasi pemerintah daerah Kab. Badung dengan pemerintah pusat. DPRD Kab. Badung turut bersinergi dengan pemerintah pusat karena pada dasarnya pusat yang menentukan segalanya dan pemerintah daerah hanya menjalankan keputusan tersebut. Bahkan partai politik yang dominan di Kab. Badung yaitu PDIP tidak dapat membantu masyarakat dalam mengusulkan raperda. Hingga adanya program *Work From Bali* (WFB) yang di mana dicetuskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Kab. Badung hanya menerima kebijakan tersebut dan menyambutnya dengan infrastuktur.

Aliran politik (*politics stream*) dalam Kingdon, kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuat adanya suatu kebijakan baru dalam menghadapi *New Normal Tourism* ini disampaikan oleh narasumber dalam wawancara. Pandemi yang semakin meningkat menyebabkan pemerintah daerah Kab. Badung tidak melakukan apapun dan hanya mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Aliran politik yang terjadi dapat terlihat

dalam penelitian ini pemerintah pusat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan suatu kebijakan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pariwisata di Badung sangatlah terpuruk di masa pandemi. Namun tetap saja pemerintah daerah tidak melakukan apapun dan hanya menerima keputusan kebijakan dari yang di atas, dalam hal ini adalah pemerintah pusat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Book

Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. Second Edition. Sage Publications

Greer, Scott. (2016). *John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies. The Oxford Handbook of Classic in Public Policy and Administration*. DOI:10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.18

Kingdon, J. (1995). *Agendas, alternatives, and public policies*. 2nd ed. New York: Longman

Policy

SE Bupati Badung No. 259 Tahun 2020 tentang Kesiapan Stakeholder Menuju “New Normal Tourism”

Article

Badungkab. (2021). *Bupati Giri Prasta Paparkan Kapasitas Perubahan APBD Dalam Penanganan Covid-19*. Diakses dari <https://badungkab.go.id/kab/berita/39549-bupati-giri-prasta-paparkan->

[kapasitas-perubahan-apbd-dalam-penanganan-covid-19](https://www.republika.co.id/berita/qc-duwi380/sector-wisata-kabupaten-badung-siap-jalakan-new-normal)

Muhammad, Hiru. (2020). *Sektor Wisata Kabupaten Badung Siap Jalakan New Normal*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qc-duwi380/sector-wisata-kabupaten-badung-siap-jalakan-new-normal>

Nabilla. (2021). *Apa Itu Work From Bali? Ini Penjelasan Lengkapnya*. Diakses dari

<https://travel.kompas.com/read/2021/06/08/123930227/apa-itu-work-from-bali-ini-penjelasan-lengkapnya>